



Implementasi Sistem Informasi Keuangan Dan Pembangunan Di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah

Fepi Suheri ¹⁾; Evi Lorita ²⁾, Tuti Handayani ³⁾, Bando Amin C. Kader ⁴⁾
^{1,2,3,4)} Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ pepisuheri@gmail.com, ²⁾ evilorita@unived.ac.id, ³⁾ tutihandayani@unived.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [10 November 2025]
Revised [21 Desember 2025]
Accepted [23 Desember 2025]

KEYWORDS

Policy Implementation, Financial And Development Information Systems, DPRD Secretariat, E-Government, Government Governance.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem informasi keuangan dan pembangunan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam proses, faktor pendukung, hambatan, serta strategi optimalisasi sistem informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pejabat dan pegawai Sekretariat DPRD, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi keuangan dan pembangunan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah telah berjalan cukup baik dan mendukung peningkatan transparansi serta akuntabilitas lembaga. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, empat faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi adalah komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Faktor komunikasi berjalan efektif melalui arahan dan koordinasi pimpinan, meskipun diperlukan sosialisasi berkelanjutan agar seluruh pegawai memahami kebijakan secara menyeluruh. Dari sisi sumber daya, ketersediaan sarana prasarana dan kompetensi pegawai sudah cukup, namun masih terbatas pada aspek teknis dan jaringan internet yang belum stabil. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen tinggi pimpinan dan pegawai terhadap digitalisasi birokrasi, sementara struktur birokrasi telah mendukung pelaksanaan sistem melalui SOP dan mekanisme pengawasan internal, meskipun dokumentasi dan evaluasi masih perlu diperkuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi sistem informasi keuangan dan pembangunan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan bagian dari transformasi digital birokrasi daerah menuju tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Namun, keberhasilan implementasi masih memerlukan peningkatan kompetensi aparatur, stabilitas infrastruktur teknologi, dan dukungan anggaran yang memadai. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik dan e-government, sedangkan secara praktis dapat menjadi acuan strategis bagi Sekretariat DPRD dalam memperkuat efektivitas dan keberlanjutan sistem informasi yang diterapkan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the financial and development information system at the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) of Central Bengkulu Regency. The research is conducted using a qualitative descriptive approach to gain an in-depth understanding of the processes, supporting factors, obstacles, and strategies for optimizing the information system in supporting transparent, efficient, and accountable governance. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document studies with officials and employees of the DPRD Secretariat, and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. Research results indicate that the implementation of the financial and development information system at the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) of Central Bengkulu Regency has been running quite well and supports improvements in the institution's transparency and accountability. Based on George C. Edwards III's policy implementation theory, the four main factors influencing the success of implementation are communication, resources, implementers' disposition, and bureaucratic structure. The communication factor runs effectively through leadership guidance and coordination, although continuous socialization is needed so that all employees understand the policy comprehensively. In terms of resources, the availability of facilities and employee competencies is sufficient, but still limited to technical aspects and unstable internet connectivity. The implementers' disposition shows a high commitment from leadership and employees to bureaucratic digitalization, while the bureaucratic structure has supported system implementation through SOPs and internal monitoring mechanisms, although documentation and evaluation still need to be strengthened. This study concludes that the implementation of the financial and development information system at the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) of Central Bengkulu Regency is part of the digital transformation of regional bureaucracy towards electronic-based government governance (SPBE). However, the success of its implementation still requires improvements in personnel competence, technology infrastructure stability, and adequate budget support. Academically, this study contributes to the development of public administration and e-government studies, while practically, it can serve as a strategic reference for the DPRD Secretariat in strengthening the effectiveness and sustainability of the implemented information system.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan, terutama dalam bidang pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Pemerintah pusat maupun daerah saat ini dituntut menerapkan sistem informasi yang terintegrasi agar proses administrasi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu wujud transformasi tersebut adalah penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang menjadi instrumen utama dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan pembangunan dan keuangan daerah secara elektronik.

Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai perangkat pendukung DPRD memiliki peran penting dalam mendukung tugas-tugas legislatif, terutama dalam fungsi anggaran, pengawasan, dan pelayanan administrasi. Seluruh kegiatan DPRD seperti rapat, reses, perjalanan dinas, serta kegiatan legislasi membutuhkan sistem administrasi keuangan yang tertib dan terdokumentasi dengan baik. Untuk itu, implementasi sistem informasi keuangan dan pembangunan menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa setiap proses dapat dipertanggungjawabkan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan standar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai daerah otonom yang masih berkembang menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas birokrasi, termasuk dalam hal penguasaan teknologi, dukungan infrastruktur, serta kualitas sumber daya manusia. Meskipun SIPD telah diterapkan secara nasional, pada praktiknya pelaksanaan sistem ini belum sepenuhnya optimal di tingkat Sekretariat DPRD. Sebagian pegawai masih menyesuaikan diri dengan sistem digital, beberapa bagian belum memiliki pemahaman teknis yang memadai, dan infrastruktur seperti jaringan internet belum selalu stabil. Kondisi ini membuat proses input data, pengelolaan anggaran, dan penyusunan laporan belum berjalan seefektif yang diharapkan.

Penerapan sistem informasi keuangan dan pembangunan seharusnya mendukung percepatan layanan administrasi, meminimalisasi kesalahan pencatatan, dan menyediakan data yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Namun, berbagai kendala internal masih muncul, seperti kurangnya pelatihan, minimnya koordinasi antarbagian, serta belum tersedianya SOP yang konsisten untuk mengatur alur kerja sistem. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada aspek komunikasi kebijakan, kapasitas sumber daya manusia, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi.

Secara teoritis, keberhasilan implementasi sistem informasi diukur melalui kemampuan organisasi menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan administratif yang konsisten. Teori implementasi kebijakan George C. Edwards III menyebutkan empat faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks Sekretariat DPRD Bengkulu Tengah, keempat faktor ini menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana penerapan sistem informasi keuangan dan pembangunan berjalan sesuai tujuan.

Dari aspek komunikasi, meskipun terdapat arahan pimpinan mengenai kewajiban penggunaan sistem, sosialisasi kebijakan belum merata kepada seluruh pegawai. Informasi sebagian besar disampaikan melalui rapat internal, namun belum didukung dengan pedoman teknis yang mudah dipahami. Akibatnya, pemahaman pegawai tentang tujuan dan manfaat sistem masih beragam.

Dari sisi sumber daya, kompetensi pegawai dalam mengoperasikan sistem masih perlu ditingkatkan. Beberapa staf masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan aplikasi berbasis digital dan belum terbiasa dengan alur kerja yang terintegrasi. Selain itu, sarana prasarana seperti komputer, jaringan internet, dan perangkat pendukung lainnya belum selalu memadai untuk mendukung kelancaran sistem.

Dari aspek disposisi atau sikap pelaksana, ditemukan bahwa sebagian pegawai memiliki komitmen yang baik dan mulai merasakan manfaat sistem, namun sebagian lainnya masih menganggap sistem sebagai beban tambahan karena membutuhkan waktu adaptasi. Perbedaan kesiapan mental ini berpengaruh terhadap konsistensi pemanfaatan sistem.

Sementara dari aspek struktur birokrasi, pembagian tugas dan alur koordinasi antarbagian belum sepenuhnya terstruktur. SOP internal masih perlu diperjelas untuk memastikan bahwa setiap pegawai memahami perannya dalam proses input data, verifikasi, hingga pelaporan.

Selain tantangan tersebut, sistem informasi keuangan dan pembangunan memiliki manfaat strategis bagi peningkatan tata kelola pemerintahan daerah. Sistem ini mampu menyediakan data real-time yang dibutuhkan dalam pengawasan, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan transparansi publik terhadap penggunaan anggaran DPRD. Dengan adanya sistem ini, DPRD dapat lebih mudah melakukan fungsi pengawasan dan memastikan bahwa program pembangunan daerah berjalan sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat.



Namun agar manfaat tersebut dapat tercapai, diperlukan implementasi yang optimal, mulai dari peningkatan kapasitas pegawai, penguatan komitmen pimpinan, penyediaan infrastruktur yang memadai, hingga penyusunan SOP yang mendukung integrasi kerja berbasis digital.

LANDASAN TEORI

Penelitian mengenai implementasi sistem informasi keuangan dan pembangunan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah menggunakan landasan teori utama dari Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III. Teori ini dipilih karena memberikan pemahaman komprehensif mengenai faktor-faktor internal birokrasi yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan, termasuk kebijakan digitalisasi pemerintahan melalui SIPD.

Menurut Edwards III (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel kunci, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini.

1. Komunikasi Kebijakan

Komunikasi menentukan sejauh mana kebijakan dipahami oleh pelaksana. Dalam konteks sistem informasi keuangan dan pembangunan, komunikasi mencakup kejelasan penyampaian tujuan, manfaat, prosedur penggunaan, serta konsistensi instruksi dari pimpinan kepada pegawai. Implementasi akan berhasil apabila pesan kebijakan disampaikan secara jelas, tidak ambigu, dan diterima oleh seluruh pelaksana tanpa distorsi.

2. Sumber Daya

Sumber daya meliputi kemampuan pegawai, ketersediaan sarana prasarana teknologi, anggaran, serta dukungan pelatihan teknis. Sistem informasi membutuhkan pegawai yang kompeten, perangkat komputer yang memadai, jaringan internet stabil, serta anggaran untuk pemeliharaan. Ketidacukupan sumber daya menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan digital.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi merujuk pada komitmen, kemauan, dan sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Sikap positif pegawai akan meningkatkan efektivitas implementasi, sebaliknya resistensi, kurangnya motivasi, atau anggapan bahwa sistem adalah beban tambahan akan menghambat pelaksanaan. Disposisi pelaksana juga mencerminkan kesiapan mental aparatur dalam menghadapi perubahan menuju digitalisasi.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup SOP, pembagian tugas, mekanisme koordinasi, serta alur kerja organisasi. Implementasi sistem informasi memerlukan struktur kerja yang teratur, prosedur operasional yang jelas, serta koordinasi antarbagi. Ketidakteraturan struktur dan tidak adanya SOP yang konsisten dapat menyebabkan ketidaktepatan input data, tumpang tindih tugas, dan ketidakjelasan tanggung jawab.

Selain teori Edwards, penelitian ini juga didukung oleh konsep e-government dan good governance. E-government menekankan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pemerintahan. Sementara good governance mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Implementasi sistem informasi keuangan dan pembangunan menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan kedua konsep tersebut.

Dengan demikian, kerangka teori penelitian ini memadukan teori implementasi kebijakan Edwards III dengan konsep e-government dan good governance untuk menganalisis sejauh mana sistem informasi keuangan dan pembangunan diterapkan secara efektif di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan menggambarkan secara mendalam bagaimana implementasi sistem informasi keuangan dan pembangunan dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai proses, hambatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan berbasis digital.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai lembaga yang secara langsung mengelola administrasi keuangan dan pembangunan DPRD. Waktu penelitian disesuaikan dengan ketersediaan informan dan kebutuhan pengumpulan data lapangan.

Subjek dan Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih secara purposive, yaitu mereka yang memiliki pemahaman, keterlibatan, atau pengalaman dalam penerapan sistem informasi keuangan dan pembangunan. Informan meliputi:

- a) Sekretaris DPRD
- b) Kepala Bagian Keuangan
- c) Kepala Subbagian Program dan Keuangan
- d) Staf operator sistem informasi
- e) Pegawai administratif yang terlibat dalam penginputan data

Pemilihan informan dilakukan berdasarkan relevansi peran dan kemampuan mereka memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Data yang digunakan terdiri dari:

- a) Data primer, diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci, observasi proses kerja, serta dokumentasi internal terkait penggunaan sistem informasi.
- b) Data sekunder, meliputi dokumen pendukung seperti SOP, laporan keuangan, laporan kegiatan, literatur terkait SIPD, serta regulasi pemerintah mengenai tata kelola keuangan daerah.

Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara Mendalam Wawancara dilakukan secara langsung menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Teknik ini memungkinkan peneliti menggali informasi secara fleksibel mengenai implementasi sistem, hambatan teknis, pemahaman pegawai, serta dukungan organisasi.
- b. Observasi Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana sistem informasi digunakan dalam kegiatan sehari-hari, seperti penginputan data, proses verifikasi, serta alur koordinasi antarbagian.
- c. Dokumentasi Dokumentasi berupa laporan keuangan DPRD, dokumen penganggaran, struktur organisasi, dan SOP digunakan untuk memperkuat hasil analisis dan memahami prosedur formal yang berlaku.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui model Miles dan Huberman, yang meliputi:

- a) Reduksi Data, yaitu proses memilih, merangkum, dan memfokuskan data sesuai kebutuhan penelitian.
- b) Penyajian Data, dengan menyusun informasi dalam bentuk narasi sistematis agar mudah dipahami.
- c) Penarikan Kesimpulan, yaitu proses merumuskan temuan penelitian terkait implementasi sistem informasi keuangan dan pembangunan.

Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu:

- a) Triangulasi sumber (membandingkan informasi antar-informan),
- b) Triangulasi teknik (wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta
- c) Triangulasi waktu untuk memastikan konsistensi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Hasil**

Penelitian mengenai implementasi Sistem Informasi Keuangan dan Pembangunan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan telah diterapkan melalui penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem ini menjadi platform utama yang mengintegrasikan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan pembangunan dan keuangan daerah. Berdasarkan temuan lapangan dan studi dokumentasi, implementasi SIPD di Sekretariat DPRD telah berjalan namun masih memerlukan penguatan dari aspek teknis, administratif, dan kelembagaan.



Gambaran Umum Implementasi Sistem Informasi

Secara umum, Sekretariat DPRD telah menggunakan dua sistem utama, yaitu sistem internal untuk pengelolaan administrasi keuangan lembaga dan SIPD sebagai sistem resmi yang terhubung dengan pemerintah daerah. Sistem internal digunakan untuk mencatat anggaran kegiatan DPRD seperti rapat, perjalanan dinas, reses, dan operasional. Data dari sistem internal tersebut kemudian disesuaikan formatnya sebelum dimasukkan ke dalam SIPD agar tercatat sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penggunaan SIPD mencakup beberapa menu utama, meliputi:

- a) Dashboard, berfungsi menampilkan ringkasan data anggaran dan realisasi.
- b) Perencanaan, digunakan untuk memasukkan data pokok-pokok pikiran DPRD dan rencana kerja.
- c) Keuangan, memuat DPA, realisasi anggaran, serta pelaporan transaksi keuangan.
- d) Pelaporan dan Evaluasi, digunakan untuk menyusun laporan pelaksanaan kegiatan DPRD yang nantinya menjadi bagian dari laporan pembangunan daerah.
- e) Master Data, memuat referensi kode program, kegiatan, hingga standar harga satuan.

Melalui menu-menu tersebut, kegiatan administrasi Sekretariat DPRD dapat dilakukan lebih terstruktur, terdokumentasi, dan terintegrasi.

Keterkaitan dengan Kebijakan Nasional

Implementasi sistem informasi ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat mengenai digitalisasi birokrasi. Beberapa regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan SIPD antara lain:

- a) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan sistem informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.
- b) PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)
Menetapkan integrasi data pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.
- c) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD
Menegaskan kewajiban daerah menggunakan SIPD sebagai platform data keuangan dan pembangunan.
- d) Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Mendorong seluruh instansi pemerintah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Dengan demikian, penerapan SIPD di Sekretariat DPRD bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan implementasi nyata dari kebijakan nasional terkait transformasi digital pemerintahan.

Sistem Informasi Keuangan Sekretariat DPRD

Penelitian menemukan bahwa pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD dilakukan melalui beberapa tahapan utama:

- a) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
RKA disusun berdasarkan kebutuhan program DPRD, yang kemudian dirumuskan dalam dokumen anggaran dan dicocokkan dengan master data SIPD.
- b) Penatausahaan dan Pelaksanaan Anggaran
Setiap kegiatan DPRD dicatat dalam sistem internal sebagai dasar penyusunan dokumen penatausahaan (SPT, SPP, dan SPJ).
- c) Penyesuaian Data dengan SIPD
Setelah diproses internal, data keuangan kemudian dimasukkan ke SIPD sesuai format dan struktur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- d) Pelaporan Realisasi Anggaran
Pelaporan dilakukan secara elektronik melalui SIPD, sehingga data dapat diakses secara real-time oleh pemerintah daerah.
Sistem informasi ini memberikan kemudahan dalam hal akses data, pelacakan realisasi anggaran, dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar.

Sistem Informasi Pembangunan

Selain aspek keuangan, penelitian menunjukkan bahwa SIPD juga berperan dalam mendukung fungsi pembangunan DPRD, terutama pada:

- a) Pencatatan hasil reses DPRD, yang menjadi masukan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- b) Dokumentasi pokok-pokok pikiran DPRD (Pokir), yang digunakan dalam penyusunan RKPD.
- c) Pelaporan kegiatan pengawasan, yang menjadi bahan evaluasi pembangunan daerah.

Dengan adanya integrasi tersebut, Sekretariat DPRD ikut berperan dalam penyediaan data pembangunan yang akurat, sehingga proses perencanaan daerah menjadi lebih partisipatif dan responsif.

Faktor Pendukung Implementasi Sistem Informasi

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi sistem informasi, di antaranya:

- a) Ketersediaan perangkat komputer dan jaringan dasar, meskipun kualitasnya bervariasi.
- b) Adanya regulasi nasional yang kuat, sehingga pelaksanaan SIPD memiliki dasar hukum yang jelas.
- c) Kehadiran struktur organisasi yang mendukung, dengan pembagian tugas antara bagian penganggaran, keuangan, dan fasilitasi pengawasan.
- d) Komitmen pimpinan untuk menerapkan sistem informasi secara terintegrasi agar laporan keuangan DPRD dapat dipertanggungjawabkan secara elektronik.

Faktor Penghambat Implementasi Sistem Informasi

Penelitian juga menemukan sejumlah hambatan non-wawancara, seperti:

- a) Infrastruktur teknologi yang belum merata
Beberapa perangkat masih menggunakan komputer lama sehingga belum mampu menjalankan aplikasi SIPD secara optimal.
- b) Kualitas jaringan internet yang tidak stabil
Hal ini menghambat proses input data yang dilakukan secara daring.
- c) Belum adanya SOP internal yang baku dan sistematis
Prosedur penggunaan SIPD belum memiliki pedoman tertulis yang lengkap.
- d) Keterbatasan anggaran khusus digitalisasi
Pengembangan sistem, pembaruan perangkat, dan pelatihan SDM belum mendapatkan porsi anggaran yang memadai.
- e) Integrasi sistem internal dengan SIPD belum otomatis
Proses penyesuaian data masih dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu dan tenaga tambahan.

Analisis Umum Implementasi Sistem

Secara keseluruhan, implementasi Sistem Informasi Keuangan dan Pembangunan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah telah berjalan, namun masih bersifat struktural tanpa dukungan penuh pada aspek teknis dan sumber daya manusia. Sistem telah digunakan untuk administrasi dasar dan pelaporan, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan perangkat, jaringan, serta kapasitas pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam perspektif kebijakan publik, implementasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem informasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada regulasi, organisasi, koordinasi, dan kapasitas birokrasi.

Pembahasan

Pembahasan penelitian mengenai implementasi Sistem Informasi Keuangan dan Pembangunan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dilakukan dengan memadukan temuan empiris dan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Pembahasan ini mencakup analisis aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, yang secara keseluruhan memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan sistem informasi digital di lingkungan Sekretariat DPRD.

1. Implementasi Sistem Informasi sebagai Bagian dari Kebijakan Nasional

Penerapan sistem informasi di Sekretariat DPRD tidak terlepas dari kebijakan nasional terkait digitalisasi pemerintahan, seperti SPBE dan SIPD. Berdasarkan dokumen penelitian, SIPD menjadi platform utama dalam pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan serta pembangunan daerah. Sistem ini memungkinkan data keuangan Sekretariat DPRD terintegrasi dengan APBD dan terkoneksi dengan pemerintah pusat secara real time.

Selain itu, pengelolaan informasi pembangunan seperti hasil reses dan pokok-pokok pikiran DPRD juga diinput ke SIPD sehingga mendukung evaluasi pembangunan daerah secara menyeluruh. Penerapan ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD telah menyesuaikan diri dengan tuntutan regulatif nasional, seperti UU 23/2014, PP 56/2005, dan Permendagri 70/2019, yang mewajibkan pemerintah daerah mengelola data secara elektronik.



2. **Komunikasi dalam Implementasi Sistem Informasi**
Menurut Edwards III, komunikasi yang baik menentukan sejauh mana pelaksana memahami tujuan kebijakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD telah melakukan komunikasi internal melalui rapat, arahan pimpinan, serta bimbingan teknis meski belum sepenuhnya terstruktur. Informasi mengenai mekanisme penggunaan sistem, tujuan digitalisasi, serta manfaat SIPD sudah dipahami pegawai pada tingkat dasar, sebagaimana tergambar pada paparan mengenai kejelasan tujuan sistem dan peran sistem dalam mendukung transparansi dan efisiensi keuangan daerah. Namun demikian, penyampaian informasi masih belum berkelanjutan dan belum dilakukan secara rutin kepada seluruh staf, sehingga terdapat ketimpangan pemahaman. Hal ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi masih memerlukan penguatan agar kebijakan dapat diinternalisasi secara merata.
3. **Sumber Daya sebagai Faktor Penentu Keberhasilan Sistem**
Sumber daya meliputi SDM, infrastruktur, dan anggaran. Berdasarkan dokumen penelitian, Sekretariat DPRD memiliki perangkat komputer, jaringan internet, dan ruang server yang mendukung pelaksanaan sistem informasi. Namun beberapa masalah tetap ditemukan, seperti keterbatasan kemampuan teknis pegawai dan ketidakstabilan akses internet yang menghambat input data dan pelaporan keuangan.
Keterbatasan SDM teknis juga berdampak pada pemanfaatan menu-menu SIPD secara optimal. Menu penting seperti Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan telah digunakan tetapi belum seluruh fitur dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan pelatihan dan adaptasi teknologi. Hal ini menguatkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan kapasitas sumber daya manusia.
4. **Disposisi atau Sikap Pelaksana**
Disposisi berkaitan dengan komitmen, kemauan, dan penerimaan pegawai terhadap kebijakan. Temuan dokumentasi menunjukkan bahwa sebagian pegawai telah memahami manfaat sistem digital dalam mempercepat pelaporan dan memperbaiki akuntabilitas. Namun sebagian lainnya masih menganggap digitalisasi sebagai beban tambahan karena memerlukan adaptasi teknologi dan tambahan waktu untuk input data, terutama ketika jaringan atau perangkat bermasalah.
Temuan ini sejalan dengan literatur penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa resistensi terhadap perubahan merupakan salah satu hambatan umum dalam implementasi sistem informasi di pemerintahan daerah, sebagaimana ditemukan oleh Supriyadi (2022) dan Sari & Kurniawan (2021). Meskipun demikian, dukungan pimpinan serta budaya kerja yang mulai menyesuaikan dengan digitalisasi menjadi modal penting dalam meningkatkan kesiapan pelaksana.
5. **Struktur Birokrasi dan Dukungan Organisasi**
Struktur birokrasi yang jelas menjadi syarat penting dalam implementasi sistem. Secara organisatoris, Sekretariat DPRD memiliki pembagian tugas yang baik antara bagian penganggaran, keuangan, dan pengawasan, yang semuanya terlibat dalam penggunaan sistem informasi.
Prosedur kerja sehari-hari juga telah mengarah pada penggunaan aplikasi digital dalam penyusunan dokumen, rapat, dan evaluasi internal. Namun demikian, beberapa kendala struktural masih ditemukan, seperti belum lengkapnya SOP tertulis terkait alur input data, mekanisme verifikasi, dan prosedur pelaporan. Evaluasi kinerja sudah dilakukan secara digital, tetapi dokumentasi tindak lanjut belum sepenuhnya formal dan sistematis.
Keterbatasan jumlah pegawai teknis juga memengaruhi efektivitas struktur pengawasan internal, yang seringkali belum berjalan optimal karena beban tugas yang tinggi.
6. **Integrasi Sistem dan Efektivitas Implementasi**
Secara teknis, integrasi antara sistem informasi internal DPRD dengan SIPD sudah berjalan, tetapi masih bersifat manual. Data dari sistem internal harus disesuaikan secara manual sebelum diinput ke SIPD sehingga membutuhkan waktu tambahan dan berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sistem belum sepenuhnya efisien dan masih membutuhkan penyempurnaan.
Namun demikian, secara umum SIPD telah membantu mempercepat akses data, mendukung penyusunan laporan keuangan dan pembangunan, serta memperkuat transparansi pengelolaan anggaran. Penggunaan SIPD juga meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah melalui integrasi data pembangunan dan anggaran.
7. **Relevansi Implementasi dengan Konsep Good Governance**
Penerapan sistem informasi berperan penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi tata kelola pemerintahan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi di Sekretariat DPRD telah meningkatkan kecepatan pelaporan, ketersediaan data real time, dan akurasi pencatatan keuangan. Hal ini sangat relevan dengan prinsip good governance, khususnya dalam aspek pengawasan legislatif dan pelayanan informasi publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sistem informasi keuangan dan pembangunan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah telah berjalan dengan baik dan menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat agar implementasinya semakin optimal.

1. Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi, sosialisasi kebijakan, dan koordinasi antarbagian telah terlaksana dengan cukup efektif. Pimpinan berperan aktif dalam memberikan arahan dan memastikan seluruh pegawai memahami tujuan serta manfaat sistem digital yang diterapkan. Meski demikian, masih dibutuhkan peningkatan dalam hal keberlanjutan sosialisasi dan konsistensi penyampaian informasi agar pemahaman pegawai terhadap kebijakan semakin menyeluruh dan merata.

2. Sumber daya

Pelaksanaan sistem informasi telah didukung oleh ketersediaan SDM yang kompeten dan sarana prasarana yang cukup memadai, termasuk komputer, jaringan internet, serta perangkat pendukung kerja lainnya. Namun, masih ditemukan keterbatasan dalam hal kapasitas teknis SDM dan ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan sistem. Kondisi ini menyebabkan beberapa proses digitalisasi belum berjalan optimal, terutama pada saat terjadi gangguan teknis atau ketika sistem membutuhkan pembaruan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan berkelanjutan serta penguatan alokasi anggaran operasional menjadi kebutuhan yang penting.

3. Disposisi atau sikap pelaksana

Komitmen pimpinan dan motivasi pegawai terhadap penerapan sistem digital tergolong sangat baik. Pimpinan memberikan teladan dalam kedisiplinan dan tanggung jawab, sementara pegawai menunjukkan antusiasme dan kemauan yang tinggi untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Budaya kerja yang terbuka dan saling membantu antarpegawai telah mendorong terciptanya lingkungan kerja yang produktif dan adaptif terhadap perubahan digital. Faktor ini menjadi modal sosial penting bagi keberlanjutan transformasi digital di lingkungan Sekretariat DPRD.

4. Struktur birokrasi

Tata kelola organisasi, pembagian peran, serta prosedur kerja telah terstruktur dengan baik dan mendukung efektivitas implementasi sistem informasi. Tersedianya SOP dan mekanisme evaluasi internal membantu menjaga keteraturan proses pelaksanaan kebijakan. Pengawasan internal dilakukan secara rutin dan berlapis, sehingga kesalahan teknis dapat segera diperbaiki. Meski demikian, dokumentasi hasil evaluasi dan koordinasi antarunit masih perlu diperkuat agar tindak lanjut kebijakan dapat terpantau secara sistematis.

Secara keseluruhan, keempat indikator menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem informasi keuangan dan pembangunan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada transparansi serta akuntabilitas. Dukungan pimpinan yang konsisten, semangat adaptasi pegawai, serta struktur birokrasi yang relatif tertata menjadi faktor utama keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai implementasi sistem informasi keuangan dan pembangunan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan acuan untuk peningkatan efektivitas kebijakan dan penguatan tata kelola organisasi ke depan, di antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Komunikasi Internal

- a) Sekretariat DPRD perlu memperkuat mekanisme sosialisasi kebijakan secara terencana, terjadwal, dan berjenjang agar seluruh pegawai memahami tujuan, manfaat, serta prosedur penggunaan sistem informasi digital secara menyeluruh.
- b) Komunikasi antarbagian harus diperkuat melalui rapat koordinasi rutin dan media komunikasi digital internal (misalnya, grup kerja daring atau aplikasi kolaboratif) untuk memastikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam penerapan sistem.
- c) Pimpinan perlu mempertahankan konsistensi dalam penyampaian pesan dan arahan kebijakan, sehingga tidak menimbulkan interpretasi ganda di tingkat pelaksana.



2. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Teknologi
 - a) Diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai melalui pelatihan berkelanjutan, khususnya dalam bidang teknologi informasi, manajemen data, dan keamanan sistem. Pelatihan ini sebaiknya dilakukan secara periodik dan berbasis kebutuhan tiap bagian.
 - b) Sekretariat DPRD perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pemeliharaan sistem, perbaikan perangkat keras, dan peningkatan jaringan internet, agar pelaksanaan sistem informasi tidak terganggu oleh kendala teknis.
 - c) Pembentukan tim teknis internal yang bertanggung jawab atas pemantauan dan penanganan cepat terhadap gangguan sistem sangat dianjurkan agar ketergantungan pada pihak eksternal dapat dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Methods (Edisi Keempat)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview: Scott, Foresman and Company.
- McLeod, R. (2017). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rachayu, R., & Maryani, S. (2023). Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Studi Kasus Implementasi SPBE di Kabupaten Bengkulu Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, 9(2), 145–158.
- Sari, D., & Kurniawan, A. (2021). Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kabupaten Sleman. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 12(3), 231–243.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(1), 77–89.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. New York: United Nations Development Programme.
- Wahab, S. A. (2018). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahyudi. (2020). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, 5(1), 33–45.

World Bank. (2019). *E-Government: Using Technology to Improve Public Sector Performance*. Washington D.C.: World Bank Group.